



bpsdmd
nusa tenggara timur

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



#bangga melayani bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



bpsdmd
nusa tenggara timur

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatNya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan baik.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Keberhasilan, permasalahan, dan hambatan yang masih dihadapi dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan merupakan tanggungjawab BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian laporan in, untuk itu kami mengharapkan masukan dan usul saran perbaikan demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Dengan selesainya penyusunan laporan kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah berkontribusi memberikan referensi dan data untuk penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2024. Semoga dengan penyampaian Laporan Kinerja, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pertanggungjawaban atas dukungan alokasi anggaran belanja daerah yang diberikan.

Kiranya laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, semoga Tuhan yang maha kuasa selalu memberkati segala usaha dan pengabdian kita.

Kupang, 03 Februari 2025

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

HENDERINA SINTICHE LAISKODAT, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19710707 199703 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai satu-satunya lembaga terakreditasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai peran strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya melalui pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa tugas Badan adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2024-2026, yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan penetapan kinerja dimaksud, terdapat 6 (enam) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang harus dicapai. Untuk mencapai 12 (dua belas) indikator kinerja utaman tersebut telah dijabarkan dalam 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, BPSDMD mendapata dukungan alokasi anggaran sebesar **Rp 20.624.014.536,-** dan target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar **Rp. 17.682.363.555,-**

Dari alokasi anggaran belanja tersebut, pada tahun 2024 BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu mewujudkan kinerja keuangan dengan penyerapan anggaran belanja sebesar **Rp. 16.187.322.135,-** atau **78,49%** dengan kinerja fisik mencapai **99,72%**. Sedangkan dari target Pendapatan, terealisasi sebesar **Rp. 3.075.712.000,-** atau **17,39%**. Adapun gambaran capaian penyerapan anggaran belanja tersebut digambarkan dalam table berikut ini:

Tabel 01 : Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja TA. 2024

RE K	PROGRAM	REK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
					KEUANGAN	KEU %	FSK %
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			20.624.014.536	16.187.322.135	78,49	99,72
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			<u>13.619.830.536</u>	<u>11.427.462.607</u>	<u>83,90</u>	<u>99,53</u>
		1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.616.000	83.054.220	95,89	100,00
		1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.374.177.000	7.913.255.366	84,42	100,00
		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.842.500	190.389.814	99,24	100,00
		1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.137.120	320.217.000	71,46	91,38
		1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.052.954.916	1.765.280.276	85,99	100,00
		1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.466.103.000	1.155.265.931	78,80	100,00
02	Pengembangan Sumber Daya Manusia			<u>7.004.184.000</u>	<u>4.759.859.528</u>	<u>67,96</u>	<u>99,95</u>
		1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	720.839.000	506.862.327	70,32	100,00
		1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6.283.345.000	4.252.997.201	67,69	99,73
JUMLAH				20.624.014.536	16.187.322.135,-	78,49	99,72

Dalam penyelenggaraan kegiatan tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT tidak hanya mendapat dukungan dana dari APBD Provinsi NTT saja, namun juga dari APBD Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas PK Provinsi, serta kegiatan Non APBD (Non Budget). Hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingginya capaian indikator kinerja pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2024, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Berikut diinformasikan capaian kinerja BPSDMD Provinsi NTT sebagaimana terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 02 : Capaian Kinerja BPSDMD Provinsi NTT TA 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat	B	B	100
		2. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	Jml Prog	4	0	0
		3. Pelatihan sesuai standar	Persen	100	100	100
		4. Pelatihan sesuai kebutuhan (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university)	JP	5.824	3.544	60,85
2	Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan	1. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	100	100
		2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	100	100
3.	Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	1. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100
		2. Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100
4.	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	Persen	100	99,04	99,04
		2. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	Persen	100	100	100
5.	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	100	99,83	99,83
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	100	100

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi v

Daftar Tabel..... vi

Daftar Lampiran vii

Bab I Pendahuluan 1

 1. Latar Belakang 1

 2. Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Nusa Tenggara Timur 2

 3. Sumber Daya Manusia 2

 4. Isu Strategis 4

 5. Dasar Hukum 7

 6. Sistematika Laporan 9

Bab II Perencanaan Kinerja 10

 1. Indikator Kinerja Utama 10

 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 14

 3. Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD..... 17

Bab III Akuntabilitas Kinerja 25

 A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023..... 25

 B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan
 Tahun 2022 dan Tahun 2023..... 33

 C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka
 Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis..... 38

 D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
 Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 41

 E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 46

 F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
 Pencapaian Pernyataan Kinerja 54

 G. Realisasi Anggaran yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi
 Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja 61

Bab IV Penutup 72

DAFTAR TABEL

Tabel 01	: Sumber Daya Manusia Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Status Kepegawaian	3
Tabel 02	: Sumber Daya Manusia Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Kategori Jabatan	4
Tabel 03	: Sumber Daya Manusia (PNS dan TKD) Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	4
Tabel 04	: Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.....	9
Tabel 05	: Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur	15
Tabel 06	: Alokasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Bersumber Dari APBD Tahun 2024.....	18
Tabel 07	: Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.....	25
Tabel 08	: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023	34
Tabel 09	: Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Rencana Strategis.....	38
Tabel 10	: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 11	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
Tabel 12	: Realisasi Belanja serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024	62
Tabel 13	: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada BPSDMD Provinsi NTT Tahun 2024	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	1. Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja 1 : - Sertifikat Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2024. 2. Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja 2 : - Tidak ada 3. Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja 3 : 1) Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai standar. 2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Pengembangan Kompetensi sesuai Standar yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024. 4. Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja 4 : - Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan.
Lampiran II	1 Sasaran Strategis II dan Indikator Kinerja 1 : - Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Keberfungsian Prasarana dan Sarana Kediklatan yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024. 2 Sasaran Strategis II dan Indikator Kinerja 2 : - Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Pemenuhan Sarana Kediklatan yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024.
Lampiran III	1. Sasaran Strategis III dan Indikator Kinerja 1 : 1) Kurikulum Pelatihan Kantor Sendiri Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik. 2) Kurikulum Bimbingan Teknis Etika Pemerintahan. 2. Sasaran Strategis III dan Indikator Kinerja 2 : 1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Penyediaan Perangkat Pembelajaran Berbasis Digital yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024. 2) Panduan Akses Pembelajaran Berbasis Digital SIPIJAR. 3) Tampilan Perangkat Pembelajaran Berbasis Digital SIPIJAR.
Lampiran IV	1. Sasaran Strategis IV dan Indikator Kinerja 1 : 1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Pengembangan Kompetensi Manajerial yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024. 2) Jumlah Target dan Realisasi Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial Tahun 2024

- 3) Surat Kepala BPSDMD Provinsi NTT, Nomor :800.2/460/BPSDMD 01.2, Tanggal 7 Mei 2024, Perihal : Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
 - 4) Surat Kepala Badan Keuangan Dearah Provinsi NTT, Nomor : 900.1.3.3/1138/BKUD3.1, Tanggal 10 Juni 2024, Perihal Ketersediaan Dana.
2. Sasaran Strategis IV dan Indikator Kinerja 2 :
- 1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural dan Pemerintahan yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024.
 - 2) Jumlah Target dan Realisasi Peserta Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural dan Pemerintahan Tahun 2024

Lampiran V Sasaran Strategis V dan Indikator Kinerja 1 :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Pengembangan Kompetensi Teknis yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Pengembangan Kompetensi Fungsional yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024.
- 3) Jumlah Target dan Realisasi Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2024.
- 4) Jumlah Target dan Realisasi Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional Tahun 2024.

Lampiran VI Sasaran Strategis VI dan Indikator Kinerja 1 :

- Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pelaksanaan Fisik Pelayanan Administrasi Perkantoran yang bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024.

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah serta pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis sebagaimana yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah, dimana LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, juga menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa tugas Badan adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung oleh 1 (satu) orang Eselon II-a yang mempunyai rumusan tugas Memimpin, Mengoordinasikan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penunjang Urusan Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Kepala Badan di bantu oleh 4 (empat) unit Eselon III-a dan 2 (dua) unit Eselon IV-a, serta para tenaga Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Sekretaris yang mempunyai rumusan tugas Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan badan.

Sekretaris di bantu oleh 2 (dua) unit Eselon IV-a, yaitu **Kepala Sub Bagian Keuangan** yang mempunyai rumusan tugas Memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan badan, serta **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum** yang mempunyai rumusan tugas Memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan

barang, serta dokumentasi dan publikasi. Disamping itu Sekretaris juga di bantu oleh 1 (Satu) orang Fungsional Perencana.

- b. Kepala Bidang Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang mempunyai rumusan tugas Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural meliputi Pelatihan Dasar, Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Sosial Kultural.
- c. Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Pemerintahan yang mempunyai rumusan tugas Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Kompetensi Teknis dan Pemerintahan meliputi Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Pemerintahan.
- d. Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi yang mempunyai rumusan tugas Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi meliputi pengembangan kompetensi fungsional dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang paling berharga, bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sumber Daya manusia di BPSDMD Provinsi NTT adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD).

Kekuatan SDM di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT saat ini sebanyak 119 (Seratus Sembilan Belas) orang , terdiri dari PNS sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang dan TKD sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang. Adapun rincian SDM sebagaimana tergambar pada tabel berikut dibawah ini:

- 1) SDM Berdasarkan Status Kepagawaian
- Dukungan Sumber Daya Manusia pada BPSDMD Provinsi NTT berdasarkan status kepegawaian dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 01
Sumber Daya Manusia Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	54	26	80	67,20
2	Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	29	10	39	32,80
Total		83	36	119	100

2) SDM Berdasarkan Kategori Jabatan

Dukungan Sumber Daya Manusia (PNS) di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kategori Jabatan digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 02
Sumber Daya Manusia Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Kategori Jabatan

No	Kategori Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Eselon 2	--	1	1	1,30
2.	Eselon 3	2	1	3	3,80
3.	Eselon 4	1	1	2	2,50
4.	Pejabat Fungsional Tertentu	19	11	30	37,50
5.	Pejabat Fungsional Umum	32	12	44	55,00
Total		54	26	80	100

3) SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dukungan Sumber Daya Manusia (PNS dan TKD) di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Jenjang Pendidikan digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 03
Sumber Daya Manusia (PNS dan TKD)
Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Doktor (S3)	-	-	-	-
2	Magister (S2)	19	14	33	27,97
3	Sarjana (S1)	27	18	45	38,14
4	Diploma III (D-III) dan DI/DII	4	1	5	4,24
5	SLTA/SMK	31	3	34	28,81
6	SLTP	1	-	1	-
7	SD	1	-	1	0,85
Jumlah		83	36	119	100

4. Isu Strategis

Memperhatikan lingkungan strategis nasional, daerah, dan internal terdapat beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Pemilihan Umum merupakan suatu peristiwa politik penting di Indonesia, dimana Pemilihan Umum yang disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Pemimpin Nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemimpin Lokal

(Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota) serta wakil-wakilnya yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat (DPD, DPR-RI, dan DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pada Pasal 434 menjelaskan bawah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah bahwa Pemilu Tahun 2024 akan dilakukan secara serentak, maka Pemerintah maupun Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dananya guna mendukung penyelenggaraan Pemilu di daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah termasuk BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan program dan kegiatannya perlu menentukan diwajibkan memilih program dan kegiatan yang prioritas untuk dapat dilaksanakan karena terdapat sejumlah anggaran di Pemerintah Provinsi NTT yang harus di relokasi untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilu serentak.

b. Penyederhanaan Birokrasi

Kebijakan penyederhanaan birokrasi diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019- 2024. Dalam arahannya Bapak Presiden menyatakan bahwa: “penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi”.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi berpeluang mengembalikan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (right sizing) karena berdampak pada pengaturan organisasi dimana memprioritaskan keberadaan Jabatan Fungsional dalam pengaturan susunan organisasi; serta penataan struktural yaitu pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional. Akibat dari kebijakan tersebut maka Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2021 telah melakukan pelantikan untuk mengalihkan jabatan structural Eselon III dan Eselon IV ke Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional tertentu pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga secara formasi jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu lebih banyak dibandingkan dengan yang menduduki Jabatan Struktural. Namun secara Tingkat kesejahteraan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi NTT belum bisa melakukan

penyesuaian tunjangan fungsional bagi para pejabat fungsional di maksud sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, demi terwujudnya kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam undang-undang dimaksud terdapat 9 (Sembilan) komponen standar/tolok ukur sebagai syarat yang harus di penuhi sebuah lembaga penyelenggara pelayanan publik, yaitu Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Kewajaran Biaya, Kualitas Sarana dan Prasarana, Produk Layanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan. Oleh karena itu BPSDMD pada setiap tahun terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik, melalui scan barcode oleh setiap penerima pelayanan, dan hasilnya di rekap, evaluasi, dan dilaporkan kepada pimpinan oleh pengelola kepegawaian dan umum.

d. Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University)

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka BPSDMD Provinsi NTT telah menginisiasi diterbitkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 123 Tahun 2022 Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur di maksud, juga telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor : 17/KEP/HK/2023 Tentang Tim Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Oleh karena itu, saat ini BPSDMD Provinsi NTT telah menyiapkan beberapa mata pelatihan dan melakukan uji coba di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT, agar dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap mata pelatihan yang disiapkan, guna ditawarkan kepada OPD dilingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Berkaca pada pengalaman di tahun 2023, bahwa pelaksanaan beberapa pelatihan/bimtek yang direncanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam evaluasinya, khusus kegiatan pelatihan Non Budget/Non APBD tidak dapat terlaksana seluruhnya, diakibatkan tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya, karena padatnya kegiatan di masing-masing OPD. Oleh karena itu direncanakan pada tahun 2024 akan lebih meningkatkan koordinasi dengan setiap OPD, melalui kelompok kerja sebagai penanggung jawab yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Landasan Idil Pancasila;
- 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 15) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 26).
- 16) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 98 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 17) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Latar Belakang Penulisan LKIP BPSDMD Provinsi NTT Tahun 2023, Gambaran Umum BPSDMD Tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDMD Tahun 2019-2023, Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Tahun 2023, Kalender Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat tentang Capaian Kinerja BPSDMD Prov. NTT Tahun 2023, Tingkat Serapan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Memuat tentang Kata Penutup pada akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP BPSDMD Prov. NTT) Tahun 2023.

Lampiran-Lampiran

Bab II

Perencanaan Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah maka Indikator Kinerja Utama yang akan di capai dari Tahun 2024 – 2026 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel : 04
Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026

SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
Meningkatkan Kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	Predikat akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Predikat	BPSDMD NTT	Akreditasi adalah Penilaian kelayakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara	Predikat akreditasi yang ditetapkan oleh LAN-RI
		Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat	BPSDMD NTT	Akreditasi adalah Penilaian kelayakan terhadap Program Pelatihan Dasara CPNS sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara	Predikat akreditasi yang ditetapkan oleh LAN-RI
		Predikat Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Predikat	BPSDMD NTT	Akreditasi adalah Penilaian kelayakan terhadap Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara	Predikat akreditasi yang ditetapkan oleh LAN-RI
		Predikat Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Predikat	BPSDMD NTT	Akreditasi adalah Penilaian kelayakan terhadap Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara	Predikat akreditasi yang ditetapkan oleh LAN-RI
		Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	Jlm Program	BPSDMD NTT	Akreditasi adalah Penilaian kelayakan terhadap Program Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga/Instansi Teknis terkait	Jumlah Program Terakreditasi
		Pelatihan sesuai standar	Program	BPSDMD NTT	Pelatihan yang mengikuti panduan dan tolok ukur yang ditetapkan, guna memastikan kualitas pelatihan dan kepuasan peserta	$\frac{\text{Realisasi Pelatihan sesuai standar}}{\sum \text{Pelatihan yang ada}}$
		Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	BPSDMD NTT	Pelatihan sesuai kebutuhan adalah Pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	$\frac{\text{Realisasi Pelatihan sesuai kebutuhan}}{\sum \text{Pelatihan yang ada}}$
		Tersertifikasinya tenaga pelatihan pada BPSDMD	Persen	BPSDMD NTT	Tersertifikasinya tenaga pelatihan adalah Tenaga Pelatihan (Pengelola / Penyelenggara / Pengajar yang telah tersertifikasi	$\frac{\sum \text{Tenaga Pelatihan yang bersertifikat}}{\sum \text{Tenaga Pelatihan yang ada}}$
		Terisnya formasi jabatan fungsional widyaiswara sesuai formasi	Persen	BPSDMD NTT	Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan (Dikjartih) PNS,	1. Analisis Kebutuhan WI Maksimal $\frac{\sum \text{JP}}{\text{JP Minimal}}$ 2. Analisis Kebutuhan WI Minimal

SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
					Evaluasi, dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah	$\frac{\sum JP}{JP \text{ Minimal}} \times \text{Rata-rata mata diklat yang diampu para WI}$ (Sumber PerLAN 8 thn 2008)
		Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan pelatihan	Persen	BPSDMD NTT	Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi; Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam memberikan jasa keahliannya tidak terikat oleh hubungan kerja	$\frac{\sum \text{Tenaga Ahli atau Narasumber yang tersedia}}{\sum \text{Tenaga Ahli atau Narasumber yang dibutuhkan}}$
	Meningkatnya sarana prasarana kepelatihan	Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD	Persen	BPSDMD NTT	Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelatihan Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan pelatihan	$\frac{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang berfungsi}}{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang tersedia}}$
		Pemenuhan Prasarana dan Sarana dan pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	BPSDMD NTT	Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelatihan Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan pelatihan	$\frac{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang terpenuhi}}{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang dibutuhkan}}$
	Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	BPSDMD NTT	Kurikulum Pelatihan adalah materi yang digunakan sebagai sumber perspektif pembelajaran, serta strategi yang digunakan, dan dimaksudkan untuk mencapai target program diklat.	$\frac{\sum \text{Kurikulum yang tersusun}}{\sum \text{Kurikulum yang dibutuhkan}}$
		Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan	Persen	BPSDMD NTT	Perangkat Pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan tenaga pelatih dan peserta melakukan kegiatan pembelajaran (RPP, Modul/Bahan Ajar, Lembar Kerja Peserta, Instrumen Evaluasi, dan Media Pembelajaran)	$\frac{\sum \text{Perangkat Pembelajaran yang tersedia}}{\sum \text{Perangkat Pembelajaran yang dibutuhkan}}$
	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	Persen	BPSDMD NTT	Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah Pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi	$\frac{\sum \text{Peserta Lulus Bangkom}}{\text{Target ASN (Peserta)}}$

SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
					(Melalui Pelatihan Kepemimpinan yang terdiri dari PKN II, PKA, PKP, dan Pelatihan Dasar CPNS)	
		Terselenggaranya Pengembangan Pelatihan Kebijakan desentralisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan pemerintah daerah dan DPRD, dan etika pemerintahan	Persen	BPSDMD NTT	Pelaksanaan Pelatihan Kebijakan Desentralisasi hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintahan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD, Etika Pemerintahan	$\frac{\sum \text{Peserta Lulus Bangkom}}{\text{Target ASN (Peserta)}}$
		Terselenggaranya pengembangan kompetensi Sosial Kultural	Persen	BPSDMD NTT	Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural adalah Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan	$\frac{\sum \text{Peserta Lulus Bangkom}}{\text{Target ASN (Peserta)}}$
	Meningkatnya kompetensi teknis dan fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	BPSDMD NTT	Pengembangan Kompetensi Teknis adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS; Pengembangan Kompetensi Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.	$\frac{\sum \text{Peserta Lulus Bangkom}}{\text{Target ASN (Peserta)}}$
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Persentrasian pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Persen	BPSDMD NTT	Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah layanan yang dapat ditemukan di lingkup perkantoran atau pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi	$\frac{\sum \text{Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terealisasi}}{\text{Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran}}$

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, maka ditetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 05
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT
dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	B	B	Predikat Akreditasi yang ditetapkan oleh LAN
		2. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	-	4	Jumlah Program Terakreditasi
		3. Pelatihan sesuai standar	-	100%	$\frac{\text{Realisasi Pelatihan sesuai standar}}{\sum \text{Pelatihan yang ada}} \times 100$
		4. Pelatihan sesuai kebutuhan (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university)	-	5824 JP	Hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university
2.	Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan	1. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD	80%	100%	$\frac{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang berfungsi}}{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang tersedia}} \times 100\%$
		2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana dan pelatihan sesuai kebutuhan	80%	100%	$\frac{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang terpenuhi}}{\sum \text{Prasarana \& Sarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$
3.	Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	1. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	50%	100%	$\frac{\sum \text{Kurikulum yang tersusun}}{\sum \text{Kurikulum yang dibutuhkan}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
		2. Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan	-	100%	$\frac{\sum \text{Perangkat Pembelajaran yang tersedia}}{\sum \text{Perangkat Pembelajaran yang dibutuhkan}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	99%	100%	$\frac{\sum \text{Peserta Lulus Bangkom}}{\text{Target ASN (Peserta)}} \times 100\%$
		2. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Sosial Kultural	100%	100%	$\frac{\sum \text{Peserta Lulus Bangkom}}{\text{Target ASN (Peserta)}} \times 100\%$
5.	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	52%	100%	$\frac{\sum \text{Peserta Lulus Bangkom}}{\text{Target ASN (Peserta)}} \times 100\%$
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	97%	100%	$\frac{\sum \text{Kegiatan Administrasi Perkantoran yang terealisasi}}{\text{Kegiatan Administrasi Perkantoran}} \times 100\%$

3. Program dan Kegiatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dukungan dana dari APBD Provinsi NTT.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor DPPA/A.3/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, dialokasikan dana APBD adalah sebesar **Rp. 20.624.014.536,-** (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Alokasi dana tersebut dianggarkan untuk pelaksanaan 2 (Dua) program dan 8 (Delapan) Kegiatan serta 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun Rincian Alokasi Dana sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini.

Tabel : 06
Alokasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Bersumber Dari APBD Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					<u>13.619.830.536,-</u>
		1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<u>86.616.000,-</u>
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Kinerja Bulanan (2024), Triwulan (2024), Semester (2024), Tahunan ; - Tersedianya Dokumen LKIP 2023; - Tersedianya Dokumen LKPJ 2023 ; - Tersedianya Laporan Bulanan Budaya Kerja 2024; - Tersedianya Laporan Reformasi Birokrasi 2024 - Tersedianya Paket Jasa Sertifikasi Surveilnce ISO 9001 : 2015	31 Dok 1 Dok 1 Dok 12 Dok 2 Dok 1 Dok	86.616.000,-
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				<u>9.374.177.000,-</u>
			- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	9.374.177.000,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
		4) Administrasi Umum Perangkat Daerah				<u>191.842.500,-</u>
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	32.940.000,-
			(2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	30.668.000,-
			(3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	10.000.000,-
			(4) Penyediaan Bahan / Material	- Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	88.234.500,-
			(5) Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya makan minum rapat dan makan minum jamuan tamu	12 Bulan	30.000.000,-
		6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<u>254.590.000,-</u>
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedianya Printer - Tersedianya Kipas Angin Dinding - Tersedianya Pompa air - Tersedianya CCTV - Tersedianya Camera - Tersedianya Komputer (PC All In One)	2 Unit 8 Unit 1 Unit 3 Paket 1 Unit 5 Unit	341.668.620,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
			(2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- Tersedianya Box Arsip - Tersedianya Menara Tandon - Tersedianya Profil Tank (Tandon) - Tersedianya Tempat sampah - Tersedianya Kursi untuk Pejabat (Kaban) - Tersedianya Lemari Arsip	70 Unit 6 Unit 6 Unit 8 Unitt 1 Unit 5 Unit	106.468.500,-
		7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<u>2.052.954.916,-</u>
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya materai	1.200 Lembar	12.000.000,-
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Jasa Lisrik - Tersedianya Jasa Air	12 Bulan 12 Bulan	450.000.000,-
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan - Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa - Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD - Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit - Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak - Tersedianya Jasa Laundry	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1.590.954.916,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
				- Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras - Tersedianya Lembur - Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN	12 Bulan 12 Bulan	
		8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<u>1.466.103.000,-</u>
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (7 Unit)	12 Bulan	220..500.000,-
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput; - Terpeliharanya Printer (20 unit); - Terpeliharanya AC (150 unit); - Terpeliharanya computer / Note Book (50 Unit)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	162.067.000,-
			(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terpeliharanya bangunan gedung kantor (Sekretariat, Ruang kerja Bidang Teknis, Selasar, Ruang Kelas, Ruang Makan, Ruang WI, Gudang Beras, Aula, Toilet Kantor, Toilet Ruang Kelas, Toilet Aula);	17 Unit	1.083.536.000,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
				Organisasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT		
		2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				<u>6.283.345.000,-</u>
			(1) Penyusunan, Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kempemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional.	- Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	1 Kegiatan	251.047..000,-
			2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	- Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 - Sertifikasi kompetensi Okupasi PPK	40 Orang 40 Orang	302.050.000,-
			(3) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	- Terselenggaranya Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS - Terlaksananya Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan - Terlaksananya Sewa Aset Tak Berwujud (Sewa Hosting Website)	1 Dok 12 Bulan 12 Bulan	205.542.000,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
				- Terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 Keg	
			(5) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional	- Terselenggaranya Pengembangan Transformasi Digital LMS (Lisensi Zoom Meeting)	12 Bulan	15.000.000,-
			(6) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	- Terselenggaranya Diklat RB bagi ASN Lingkup Pemeintah Provinsi NTT	40 Orang	5.509.706.000,-
				- Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Lingkup Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota / Instansi Vertikal se-NTT	79 Orang	
				- Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Instansi Vertikal se-NTT	113 Orang	
				- Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN) Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Instansi Vertikal se-NTT	16 Orang	
TOTAL REALISASI						20.624.014.536,-

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Capaian Kinerja Organisasi BPSDMD Provinsi NTT sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis BPSDMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023, kemudian dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSDMD Provinsi NTT dengan Gubernur NTT. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2023, maka dapat dilaporkan capaian kinerja organisasi sebagaimana tergambar pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 07
Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CONVERSI NILAI CAPAIAN %	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat	B	B	100	100	
		2. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	Jml Prog	4	0	0	0	Tidak ada anggaran
		3. Pelatihan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	
		4. Pelatihan sesuai kebutuhan (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university)	JP	5.824	3.544	60,85	61	
2	Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan	1. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	100	100	100	
		2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana dan pelatihan sesuai	Persen	100	100	100	100	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CONVERSI NILAI CAPAIAN %	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kebutuhan						
3.	Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	1. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	Tdk ada anggaran
		2. Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	
4.	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	Persen	100	99,04	99,04	99	
		2. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	Persen	100	100	100	100	
5.	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	100	99,83	99,83	100	
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara memiliki 6 (Enam) Sasaran Strategis badan yang diukur melalui 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan untuk dicapai. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari indikator-indikator yang telah ditetapkan realisasinya sebagian besar mencapai target bahkan ada yang melampaui target.

Pengukuran capaian kinerja utama yang tercantum dalam penetapan dan rencana kinerja tahun 2024 yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana), atau dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut diatas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi maka kinerja semakin buruk. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

- a. $X \geq 85\%$: Sangat Baik
- b. $70\% \geq X > 85\%$: Baik
- c. $55\% < X \leq 70\%$: Cukup Baik
- d. $X \leq 55\%$: Belum Baik

Secara keseluruhan pengukuran rata-rata tingkat capaian kinerja BPSDMD Provinsi NTT Tahun 2024, dilakukan dengan cara menjumlahkan realisasi seluruh nilai capaian di bagi dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang ditargetkan untuk di capai pada tahun 2024. Tingkat rata-rata capaian kinerja BPSDMD Provinsi NTT tahun 2024 sebesar **88,31% (KATEGORI SANGAT BAIK)**, yang dihitung berdasarkan persentase nilai capaian indikator kinerja utama yaitu :

$$\frac{100\% + 0 + 100\% + 60,85\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 99,04\% + 100\% + 99,83\% + 100\%}{12} = 88,31 \text{ (Sangat Baik)}$$

Memperhatikan bahwa ada indikator kinerja utama yang tidak terealisasi dan realisasinya rendah, yaitu pada indikator Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional dan indikator Pelatihan sesuai kebutuhan, maka Kepala BPSDMD NTT telah melakukan usaha secara optimal agar kedepan capaian indikator kinerja tersebut, dapat terealisasi sesuai target. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengendalian internal dan memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi non budget dengan mengoptimalkan para pejabat fungsional Widyaiswara dilingkungan BPSDMD Provinsi NTT.

Berdasarkan capaiannya kinerja BPSDMD Provinsi NTT sebagaimana terlihat pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan rata-rata capaian indikator kinerja utama dari setiap unsur sasaran strategis sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis I : Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dimaksud

adalah sebesar 65,21% (Enam Puluh Lima Koma Dua Puluh Satu Persen) dengan Kategori **Cukup Baik**, Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$100 + 0 + 100 + 60,85 / 4 = 65,21 \text{ (Cukup Baik)}$$

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut diatas ditetapkan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut :

- a. Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS adalah Penilaian kelayakan terhadap Program Pelatihan Dasar CPNS sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target akreditasi pada Program Pelatihan Dasar adalah B. Berdasarkan hasil penilaian dari LAN-RI maka predikat akreditasi yang diperoleh BPSDMD Provinsi NTT adalah B sesuai Sertifikat Akreditasi Pelatihan Dasar Nomor : 1048/K.1/PDP.09, Tanggal 18 September 2024, dengan nilai capaian 100%. Adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
- b. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional adalah Akreditasi adalah Penilaian kelayakan terhadap Program Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga/Instansi Teknis terkait. Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target sebanyak 4 (Empat) program pelatihan teknis dan fungsional, namun realisasinya adalah 0%, karena berdasarkan ketentuan bahwa akreditasi program pelatihan teknis dan fungsional dapat dilakukan jika kegiatan diklat tersebut minimal sudah dilaksanakan 2 (dua) kali, selain itu juga disebabkan karena tidak adanya alokasi dana dari APBD Provinsi NTT.
- c. Pelatihan sesuai standar adalah Pelatihan yang memenuhi persyaratan dan tolok ukur yang ditetapkan, guna memastikan kualitas pelatihan dan kepuasan peserta. Pelatihan sesuai standar harus memiliki panduan pelatihan yang jelas yang dibuat oleh penyelenggara pelatihan dan lembaga penyelenggara pelatihan telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran.

Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target capaian kinerja sebesar 100% (Seratus Persen). Berdasarkan hasil evaluasi dari 23 (dua puluh tiga) Program Pelatihan (Pelatihan, Bimtek, dan Orientasi) seluruhnya terlaksanakan sesuai rencana, atau realisasinya mencapai 100%. Kegiatan ini tidak saja bersumber dari APBD Provinsi NTT namun juga dari APBD Kabupaten/Kota, Dana Spesifik Grand Dinas PK Provinsi NTT, dan juga Non APBD (Non Budget), adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

- d. Pelatihan sesuai kebutuhan adalah adalah Pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (Fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university). Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target sebanyak 5.824 JP (Jam Pelajaran), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 3.544 JP atau 60,85% dari 23 (dua puluh tiga) program pelatihan yang dilaksanakan, adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
2. Capaian Sasaran Strategis II : Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dimaksud adalah sebesar 100% (Seratus Persen) dengan Kategori **Sangat Baik**, Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$100 + 100 / 2 = 100\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut diatas ditetapkan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut :

- a. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD NTT, Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelatihan, dan Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan pelatihan. Berfungsinya prasarana dan sarana adalah terpakainya seluruh ruangan, peralatan dan perlengkapan dalam menunjang aktifitas pembelajaran di BPSDMD Provinsi NTT. Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala

Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 100%. Kegiatan ini mendapat dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

- b. Pemenuhan Prasarana dan Sarana pada BPSDMD NTT, Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelatihan, dan Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan pelatihan. Pemenuhan prasarana dan sarana adalah tersedianya secara memadai prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan aktifitas pembelajaran di BPSDMD Provinsi NTT. Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 - 2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 100%. Kegiatan ini mendapat dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
3. Capaian Sasaran Strategis III : Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dimaksud adalah sebesar 100% (Seratus Persen) dengan Kategori **Sangat Baik**, Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$100 + 100 / 2 = 100\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut diatas ditetapkan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut :

- a. Tersusunnya kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan. Kurikulum adalah materi yang digunakan sebagai sumber perspektif pembelajaran, serta strategi yang digunakan, dan dimaksudkan untuk mencapai target program diklat. Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 100%. Kegiatan ini dilakukan oleh para Widyaiswara

tanpa dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, adapun dokumen kurikulum sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

- b. Tersedianya perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan tenaga pelatih dan peserta melakukan kegiatan pembelajaran (Media pembelajaran berbasis digital). Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 100%. Kegiatan pembuatan Aplikasi pembelajaran (LMS - SiPIJAR) dilakukan oleh para pranata komputer di BPSDMD Provinsi NTT, tanpa dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT (Non Budget), untuk menjalankan aplikasi pembelajaran di maksud, BPSDMD Provinsi NTT membangun kerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi NTT untuk mendapat kuota internet, guna pelaksanaan pembelajaran dan penyimpanan dokumen pembelajaran. Alokasi dana dari APBD yang tersedia dalam DPA-BPSDMD Provinsi NTT, adalah hanya untuk membiayai pembelian akun guna kebutuhan pelaksanaan pembelajaran dengan sistem online, adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
4. Capaian Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dimaksud adalah sebesar 99,52% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Dua Persen) dengan Kategori **Sangat Baik**, Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$99,04 + 100 / 2 = 100\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut diatas ditetapkan indikator kinerja utama dan capaiannya sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial. Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah Pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi (Melalui Pelatihan Kepemimpina yang terdiri dari PKN II, PKA, dan PKP). Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran.

Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 99,04%. Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya mendapat dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT dan APBD Kabupaten/Kota dalam bentuk kontribusi pelatihan sesuai dengan jumlah peserta yang di kirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

- b. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan adalah peningkatan kemampuan dan karakteristik Aparatur Sipil Negara agar dapat berkontribusi secara optimal bagi organisasi, melaksanakan tugas secara profesional, dan berdaya saing serta tepat guna. Sedangkan Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural adalah Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 100%. Kegiatan tersebut mendapat dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Kupang, dan Non APBD (Non Budget), adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

5. Capaian Sasaran Strategis V : Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dimaksud adalah sebesar 99,83% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen) dengan Kategori **Sangat Baik**.

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut diatas ditetapkan indikator kinerja utama adalah Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Pengembangan Kompetensi Teknis adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS; Pengembangan

Kompetensi Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.

Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada Tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 99,83% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen). Kegiatan ini mendapat dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten/Kota, serta Spesifik Grand dari Dinas PK Provinsi NTT, adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

6. Capaian Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dimaksud adalah sebesar 100% (Seratus Persen) dengan Kategori **Sangat Baik**.

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut diatas ditetapkan indikator kinerja utama adalah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah layanan yang dapat ditemukan di lingkup perkantoran atau pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi.

Pada Renstra BPSDMD NTT Tahun 2024 -2026 telah ditetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai di setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Badan dengan Gubernur NTT. Pada tahun 2024, BPSDMD Provinsi NTT menargetkan capainya adalah 100% (Seratus persen), dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 100%, kegiatan ini mendapat alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

- B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 08

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			KET
				TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	Persen	80	94	117	85	91	107	-	86,45	8.645	PKA, PKP, PBJ
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	Persen	80	92	115	85	99	116	-	99,97	9.997	PKN II, PKA, PKP, PPPK
		3. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	Persen	80	80	100	85	92	108	-	90,36	9.036	PKA, PKP, PBJ
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	Persen	80	82	105	85	82	97	85	67,96	79,95	
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	Dok	4	-	-	4	24	600	-	19	1.900	Tahun 2022 dana kegiatan kerja sama difocusing
		6. Predikat Akreditasi Program Diklat (Latsar, PIM, Program Diklat Lainnya	Predikat Akreditasi	Kepemimpinan A	B	50	-	-	-	B	B	100	Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			KET
				TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7. Jumlah Program diklat terakreditasi	Jumlah	4	4	100	4	4	100	4	4	100	CPNS, PKA, PKP, PBJ
		8. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	Jumlah	-	-	-	-	-	-	4	0	0	Tidak ada anggaran
		9. Pelatihan sesuai standar	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	Seluruh Pelatihan
		10. Pelatihan sesuai kebutuhan (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university)	JP	-	-	-	-	-	-	5.824 JP	3.544 JP	60,85	JP seluruh pelatihan
2	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	Persen	95	99	104	95	56	59	-	99,04	9.904	
		2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	Persen	50	15	30	65	27	42	-	36,65	3.665	
		3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan	Persen	45	89	198	30	73	243	-	57,59	5.759	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		predikat memuaskan											
		4. Persentasi peserta yang yang lulus ujian kompetensi PBJ	Persen	70	11	16	80	23	29	-	41,98	4.198	
3	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	Persen	-	99,47	9.947	-	99,68	9.968	100	99,04	99,04	
		2. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	Persen	-	100	10.000	-	46,30	4.630	100	100	100	
4.	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	-	96,46	9.646	-	100	10.00	100	99,83	99,83	
5.	Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	1. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	-	66,66	6.666	-	50	5.000	100	100	100	
		2. Tersedianya Perangkat	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			KET
				TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pembelajaran sesuai kebutuhan											
6.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	Dokumen	3	2	66,66	6	3	50	-	2	200	
		2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	Media	1	4	500	1	5	500	-	7	700	Facebook, IG, Tiktok, Youtube, Twiter, Website, Buletin Prima
7.	Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan	1. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD NTT	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
		2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana pada BPSDMD NTT	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
8.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	50	50	100	97	97	100	100	100	Tahun 2022 dana direfocusing

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis

Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 09

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah
Dalam Dokumen Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI S/D 2023	REALISASI TAHUN 2024
1	2	3	4		7	8
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	Persen	85	89,33	86,45
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	Persen	85	97	99,97
		3. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	Persen	85	90,66	90,36
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	Persen	85	81	67,96
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	Dok	16	27	19
		6. Predikat Akreditasi Program Diklat (Latsar, PIM, Program Diklat Lainnya	Predikat Akreditasi	Kepemimpinan A Latsar B dan Program Diklat Lainnya B	Latsar B Pim B PBJ B	Latsar B
		7. Jumlah Program diklat terakreditasi	Jumlah	11	4	4
		8. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	Jumlah	4	0	0
		9. Pelatihan sesuai standar	Persen	100	-	100
		10. Pelatihan sesuai kebutuhan (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university)	JP	5.824	-	3.544

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI S/D 2023	REALISASI TAHUN 2024
1	2	3	4		7	8
2	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	Persen	95	85	99,04
		2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	Persen	65	19	36,65
		3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	30	82	57,59
		4. Persentasi peserta yang lulus ujian kompetensi PBJ	Persen	80	23	41,98
3.	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	Persen	100	99,68	99,04
		2. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	Persen	100	46,30	100
4.	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	100	100	99,83
5.	Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	1. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	100	55,55	100
		2. Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan	Persen	100	-	100
6.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	Dokumen	9	5	2
		2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	Media	6	5	7
7.	Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan	1. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	-	100
		2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	-	100

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI S/D 2023	REALISASI TAHUN 2024
1	2	3	4		7	8
8.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	97	100

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Pengendalian dan Mutu Diklat terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS ditargetkan capaiannya adalah B. Penetapan predikat akreditasi dilakukan oleh LAN-RI melalui proses evaluasi terhadap lembaga maupun penyelenggaraan pelatihannya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi terutama berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana kepelatihan. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Terhadap rekomendasi tersebut, Kepala Badan melakukan pengendalian internal dengan mengarahkan dan memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap gedung dan pengadaan sarana pelatihan dan penginputan dokumen. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi dan dari APBD Provinsi NTT yang tersedia dalam DPA BPSDMD Provinsi NTT.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut, selanjutnya dilaporkan ke LAN-RI dengan mengupload bukti kegiatan untuk kebutuhan penilaian, maka pada tahun 2024 LAN-RI menetapkan Akreditasi Pelatihan Dasar di BPSDMD Provinsi NTT dengan kategori nilai B atau realisasi capaiannya 100%. Dari hasil penilaian oleh LAN-RI secara kuantitatif (nilai angka) terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 81,787 menjadi 88,938;

- b) Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional ditargetkan capaiannya adalah 4 (empat) program pelatihan, namun indikator tersebut tidak dapat dicapai karena syarat minimal agar sebuah program pelatihan dapat terakreditasi adalah minimal telah melaksanakan 2 (dua) kali penyelenggaraan kegiatan. Berkaitan dengan itu kedepan BPSDMD Provinsi NTT akan mengoptimalkan pengendalian internal dan meningkatkan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT serta Kabupaten/Kota guna mendapatkan data pelatihan yang dibutuhkan untuk diagendakan dalam perencanaan pelatihan baik melalui alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten/Kota, maupun pelatihan yang sifatnya non budget;
- c) Pelatihan sesuai standar adalah Pelatihan yang mengikuti panduan dan tolok ukur yang ditetapkan, guna memastikan kualitas pelatihan dan kepuasan peserta.

ditargetkan capaiannya adalah 100%. Berdasarkan hasil evaluasi realisasinya kinerjanya mencapai 100%, karena 23 (dua puluh tiga) kegiatan pelatihan yang ditargetkan dapat terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan dalam bentuk Pelatihan, Bimtek, dan Orientasi, yang bersumber dari alokasi dana APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten/Kota se-NTT, Spesifik Grand (DAK Dinas PK NTT), maupun non budget. Berbagai kegiatan pelatihan tersebut dilakukan berdasarkan standar pelatihan baik dari aspek regulasi maupun teknisnya. Adapun jumlah peserta yang ditargetkan adalah sebanyak 6.949 (enam ribu sembilan ratus sembilan empat puluh sembilan) orang, realisasi peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 6.936 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam) orang atau 99,81%. Terhadap kondisi tersebut Kepala BPSDMD Provinsi NTT melakukan pengendalian internal dengan mengarahkan Kabid Teknis yang bertanggung jawab untuk membuat pedoman pelaksanaan pelatihan yang dapat mengikat peserta yang mengikuti pelatihan untuk dapat menyelesaikan proses pelatihannya.

- d) Pelatihan sesuai kebutuhan Pelatihan sesuai kebutuhan adalah Pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university). Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 5.824 Jam Pelajaran (JP). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya terealisasi 3.544 JP. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai perubahan regulasi yang harus disesuaikan, sehingga menyebabkan sangat tingginya aktifitas yang bersifat administratif dari para Pengelola, Penyelenggara, dan pengajar di BPSDMD NTT. Terhadap kondisi tersebut Kepala BPSDMD Provinsi NTT telah melakukan pengendalian internal dengan mengarahkan para Kepala Bidang Teknis bersama para Widyaiswara, agar mulai merancang berbagai pelatihan sesuai fungsi masing-masing bidang untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2025.
2. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Prasarana dan Sarana Kepelatihan, terdapat 2 (Dua) indikator kinerja dan realisasinya di tahun 2024 sebagai berikut :
 - a) Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD Provinsi NTT. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelatihan, dan Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk

mencapai maksud dan tujuan pelatihan. Berfungsinya prasarana dan sarana adalah prasarana dan sarana yang ada dapat dipergunakan untuk kebutuhan pelatihan. Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaiannya adalah 100% yang artinya bahwa seluruh prasarana dan sarana setelah direhabilitasi / perbaikan dapat berfungsi untuk kebutuhan penyelenggaraan pelatihan. Capaian kinerja ini akan terus dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya.

- b) Pemenuhan prasarana dan sarana pada BPSDMD Provinsi NTT, adalah tersedianya prasarana dan sarana pelatihan secara memadai untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelatihan. Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaiannya adalah 100%, yang artinya bahwa setelah dilakukan pengadaan sarana yang baru maka dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelatihan. Capaian kinerja ini akan terus dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya.

3. Pada sasaran strategis pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran, terdapat 2 (Dua) indikator kinerja dan realisasinya di tahun 2024 sebagai berikut :

- a) Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan Kurikulum Pelatihan. Kurikulum pelatihan adalah materi yang digunakan sebagai sumber perspektif pembelajaran, serta strategi yang digunakan, dan dimaksudkan untuk mencapai target program diklat. Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaiannya adalah 100%. Penyusunan kurikulum ini dilakukan oleh para Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTT, berdasarkan hasil uji kompetensi ASN di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT, yang dilakukan oleh Asesor BKD Provinsi NTT melalui media CAT (Computer Assisted test). Kegiatan penyusunan Kurikulum tersebut dilakukan tanpa mendapat dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT. Hasil dari kurikulum tersebut telah dilakukan uji coba secara internal dilingkungan aparatur BPSDMD NTT untuk dilakukan penyempurnaan, agar dalam penerapannya kedepan tidak terjadi kendala. Dari kegiatan ini terdapat 2 (Dua) kurikulum pelatihan yang telah disusun yaitu terdiri dari : 1) Kurikulum Inovasi Pelayanan Publik, 2) Kurikulum Etika Pemerintahan;
- c. Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan. Perangkat Pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan tenaga pelatih dan peserta melakukan kegiatan pembelajaran (Media pembelajaran berbasis

digital). Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaiannya adalah 100%. Kegiatan pembuatan Aplikasi pembelajaran (LMS - SiPIJAR) dengan memanfaatkan tenaga SDM Pranata Komputer di BPSDMD Provinsi NTT, dengan tanpa dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT (Non Budget). LMS-SiPIJAR telah dimanfaatkan dengan proses uji coba pada penyelenggaraan Orientasi Nilai dan Etika Organisasi bagi PPPK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap media pembelajaran LMS-SiPIJAR tidak terdapat kendala, seluruh pembelajaran berjalan lancar dan baik. Oleh karena itu, pada tahun 2025 LMS-SiPIJAR akan diterapkan dalam seluruh penyelenggaraan pelatihan secara berbayar sebagai obyek baru dalam penerimaan pendapatan di BPSDMD Provinsi NTT;

4. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN terdapat 2 (Dua) indikator kinerja dan realisasinya di tahun 2024 sebagai berikut :

- a) Terselenggaranya pengembangan kompetensi manajerial Pengembangan Kompetensi Manajerial. Pengembangan kompetensi manajerial adalah pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi (Pelatihan Kepemimpinan yang terdiri dari PKN II, PKA, dan PKP). Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaiannya adalah 99,04%. Tidak tercapainya target kinerja tersebut karena terdapat 1 (satu) orang peserta PKP yang tidak menyelesaikan proses pelatihannya, dan 1 (satu) orang peserta PKN Tk.II yang tidak bisa mengikuti pelatihan karena tidak memenuhi syarat jabatan. Terhadap kondisi ini Kepala BPSDMD Provinsi NTT telah melakukan pengendalian internal, dengan mengarahkan Kepala Bidang Teknis untuk membuat pedoman pelatihan dengan menambahkan syarat bagi peserta diklat kepemimpinan wajib untuk menandatangani Pakta Integritas, guna mengikat peserta agar menyelesaikan pelatihannya, sehingga menghindari kerugian daerah.

- b) Terselenggaranya pengembangan kompetensi pemerintahan dan sosial kultural. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan adalah Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku ASN dalam melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan. Sedangkan Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural adalah

pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%, dan berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaiannya adalah 100%. Terdapat 6 (enam) kegiatan pelatihan, namun yang menggunakan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT, hanya 1 (satu) kegiatan yaitu pelatihan Reformasi Birokrasi dan 1 (satu) kegiatan lagi bersumber dari APBD Kabupaten Kupang dengan metode penyelenggaraannya adalah fasilitasi. Sedangkan 4 (empat) kegiatan lainnya adalah non budget (Non APBD). Dalam rangka meningkatkan kinerja BPSDMD Provinsi NTT, maka Kepala Badan telah melakukan pengendalian internal, dengan mengarahkan para Kepala Bidang Teknis untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan para Widyaaiswara yang telah ditempatkan di masing-masing bidang, untuk mengkaji dan merancang berbagai kegiatan pelatihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi bidang, untuk diusulkan dalam rencana pelatihan di setiap tahun.

5. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerja Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Pengembangan Kompetensi Teknis adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Sedangkan Pengembangan Kompetensi Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%, dan berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaiannya adalah 99,83%, indikator ini tidak mencapai 100% karena terdapat peserta yang tidak menyelesaikan proses pelatihannya. Pada indikator ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan pelatihan, namun yang menggunakan alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi NTT hanya 4 (empat) kegiatan, sedangkan 9 (sembilan) pelatihan lainnya diselenggarakan dengan metode fasilitasi, karena anggarannya bersumber dari Alokasi DAK Dinas PK Provinsi NTT dan APBD Kabupaten/Kota se-NTT. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPSDMD Provinsi NTT, maka Kepala Badan telah melakukan pengendalian internal, dengan mengarahkan para Kepala Bidang Teknis

untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan para Widyaiswara guna membuat pedoman teknis dalam setiap penyelenggaraan pelatihan, sehingga dapat mengikat peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan sampai akhir pembelajaran;

6. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerjanya adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pelayanan administrasi perkantoran adalah layanan yang dapat ditemukan di lingkup perkantoran atau pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi. Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 100%, dan berdasarkan hasil evaluasi realisasinya mencapai 100%. Dalam rangka mempertahankan kinerja BPSDMD Provinsi NTT maka Kepala Badan melakukan pengendalian internal, dengan mengarahkan para Sekretaris serta Kasubag Kependidikan dan Umum agar selalu memperhatikan masalah pelayanan administrasi di kantor, serta berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana kepelatihan secara memadai.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel : 10

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI %
1	2	3	4			
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat	100	94,81	5,47
		2. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	Jml Prog	0	0	0
		3. Pelatihan sesuai standar	Persen	100	70,48	41,90
		4. Pelatihan sesuai kebutuhan (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university)	JP	60,50	0	6.050
2	Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan	1. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	78,80	26,90
		2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	71,46	39,93
3.	Terwujudnya pengembangan	3. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	100	0	10.000

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI %
1	2	3	4			
	kurikulum dan perangkat pembelajaran	4. Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan	Persen	100	18,92	428,54
4.	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	Persen	99,04	67,57	46,57
		2. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	Persen	100	72,55	37,83
5.	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	99,83	65,00	53,60
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	85,02	17,60

Keterangan Rumus Perhitungan Tingkat Efisiensi :

$$\frac{\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran}}{\% \text{ Penyerapan Anggaran}} \times 100$$

3. Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Pengendalian dan Mutu Diklat terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS. Ditargetkan capaiannya adalah B. Dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja ini maka dialokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 136.695.000,- dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 100%, namun dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. Rp. 129.594.898,- atau 94,81%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada terdapat efisiensi sebesar 5,47%. Efisiensi ini disebabkan karena terdapat sisa belanja yang tidak digunakan;
- b) Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional. Ditargetkan capaiannya adalah 4 (empat) program pelatihan, namun indikator kinerja ini tidak dapat terealisasi karena syarat minimal agar sebuah program pelatihan dapat terakreditasi adalah minimal telah melaksanakan 2 (dua) kali penyelenggaraan kegiatan, selain itu karean tidak ada dukungan alokasi APBD Provinsi NTT;

- c) Pelatihan sesuai standar adalah Pelatihan yang mengikuti panduan dan tolok ukur yang ditetapkan. Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%. Dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja ini maka dialokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 6.532.595.000,- dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 100% atau seluruh kegiatan pelatihan yang ditargetkan dapat terselenggara, namun dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 4.395.159.655,- atau 67,28%, berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada terdapat efisiensi sebesar 48,63%. Efisiensi ini disebabkan karena:
- Kegiatan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan dana kontribusi sebesar Rp. 408.443.783,- yang merupakan dana silpa;
 - Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) lingkup Pemerintah Provinsi karena tidak melakukan studi lapangan ke luar NTT sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 1.217.893.837;
 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk II) terdapat 1 (satu) orang yang pelaksanaan pelatihannya di tanggung oleh pihak penyelenggara, dan 1 (satu) orang lagi tidak bisa mengikuti pelatihan karena belum memenuhi syarat jabatan, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 60.474.698,-
 - Pelatihan Teknis dan Fungsional sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 358.008.936,-
 - Pelatihan Pemerintahan dan Sosial Kultural sehingga terdapat sisa dana Rp. 41.459.451,-
 - Terdapat pembayaran honorarium bagi narasumber internal (BPSDMD NTT) sebesar 50%, sesuai amanat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 51.154.640,-
 - Pada indikator ini terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan pengembangan kompetensi yang ditargetkan, dan penyelenggaraannya sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu terdiri dari Pelatihan, Bimtek, dan Orientasi. Kegiatan dimaksud pembiayaannya bersumber dari alokasi dana APBD Provinsi NTT

sebanyak 8 (delapan) kegiatan, APBD Kabupaten/Kota se-NTT sebanyak 8 (delapan) kegiatan, Spesifik Grand (DAK Dinas PK NTT) sebanyak 1 (satu) kegiatan, dan non budget sebanyak 4 (empat) kegiatan.

- d) Pelatihan sesuai kebutuhan Pelatihan sesuai kebutuhan adalah Pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university). Indikator ini ditargetkan capaiannya adalah 5.824 Jam Pelajaran (JP). Berdasarkan point c diatas, realisasinya mencapai 3.526 JP atau 60,50%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada terdapat efisiensi sebesar 6.050%. Pada indikator ini tidak terdapat dukungan alokasi dana APBD, namun perhitungannya berdasarkan jumlah Jam Pelajaran yang terealisasi dari setiap jenis pengembangan kompetensi yang dilaksanakan.
4. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Prasarana dan Sarana Kepelatihan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dan realisasinya di tahun 2024 sebagai berikut :
- a) Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD Provinsi NTT. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelatihan, dan Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan pelatihan. Berfungsinya prasarana dan sarana adalah prasarana dan sarana yang ada dapat dipergunakan untuk kebutuhan pelatihan. Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%. Dalam rangka mendukung tercapainya inidikator kinerja ini maka dialokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 1.466.103.000,- dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 100% atau seluruh kegiatan pelatihan yang ditargetkan dapat terselenggara, namun dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 1.155.265.931,- atau 78,80%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada, terdapat efisiensi sebesar 26,90%. Efisiensi ini disebabkan kegiatan pemeliharaan asrama yang tidak bisa terlaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan dan merupakan sisa belanja;
- b) Pemenuhan prasarana dan sarana pada BPSDMD Provinsi NTT, adalah tersedianya prasarana dan sarana pelatihan secara memadai untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelatihan. Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%. Dalam rangka mendukung tercapainya inidikator kinerja ini maka dialokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 448.137.120,- dan berdasarkan hasil

evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 100% atau seluruh kegiatan pelatihan yang ditargetkan dapat terselenggara, namun dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 320.217.000,- atau 71,46%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada, terdapat efisiensi sebesar terdapat efisiensi sebesar 39,93%, efisiensi ini merupakan sisa belanja.

5. Pada sasaran strategis pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dan realisasinya di tahun 2024 sebagai berikut :

- a) Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan Kurikulum Pelatihan. Kurikulum pelatihan adalah materi yang digunakan sebagai sumber perspektif pembelajaran, serta strategi yang digunakan, dan dimaksudkan untuk mencapai target program diklat. Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%. Indikator kinerja ini tidak mendapat dukungan alokasi dana melalui APBD Provinsi NTT, namun dapat dilaksanakan secara non budget oleh para Widyaiswara di BPSDMD Provinsi NTT, berdasarkan hasil uji kompetensi ASN di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT yang dilakukan oleh Asesor BKD Provinsi NTT melalui media CAT (Computer Assisted test). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 10.000%. Dari kegiatan ini terdapat 2 (Dua) kurikulum pelatihan yang telah disusun yaitu terdiri dari : 1) Kurikulum Inovasi Pelayanan Publik, 2) Kurikulum Etika Pemerintahan, yang telah diujicoba di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT;
- b) Tersedianya Perangkat Pembelajaran sesuai kebutuhan. Perangkat Pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan tenaga pelatih dan peserta melakukan kegiatan pembelajaran (Media pembelajaran berbasis digital). Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, dialokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 15.000.000,- berdasarkan hasil evaluasi secara kinerja mencapai 100% atau tersedianya media pembelajaran berbasis digital yang dinamakan SiPIJAR. Namun dari aspek aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 2.838.660,- atau 18,92%, penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk belanja akun, guna mendukung proses pembelajaran online. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada, terdapat efisiensi sebesar 482,54%, ini disebabkan karena kegiatan penyediaan perangkat pembelajaran (LMS - SiPIJAR) dilakukan dengan memanfaatkan tenaga SDM Pranata Komputer di BPSDMD

Provinsi NTT. LMS-SiPIJAR telah diujicoba pada penyelenggaraan Orientasi Nilai dan Etika Organisasi bagi PPPK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap media pembelajaran LMS-SiPIJAR tidak terdapat kendala, seluruh pembelajaran berjalan lancar dan baik. Oleh karena itu, pada tahun 2025 LMS-SiPIJAR akan diterapkan dalam seluruh penyelenggaraan pelatihan secara berbayar sebagai obyek baru dalam penerimaan pendapatan di BPSDMD Provinsi NTT;

6. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN terdapat 2 (dua) indikator kinerja dan realisasinya di tahun 2024 sebagai berikut :

a) Terselenggaranya pengembangan kompetensi manajerial Pengembangan Kompetensi Manajerial. Pengembangan kompetensi manajerial adalah pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi (Pelatihan Kepemimpinan yang terdiri dari PKN II, PKA, dan PKP). Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%, dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja ini maka dialokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 5.358.681.000,- dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 99,04%, tidak tercapainya target kinerja tersebut karena terdapat 1 (satu) orang peserta PKP yang tidak menyelesaikan proses pelatihannya, dan 1 (satu) orang peserta PKN Tk.II yang tidak bisa mengikuti pelatihan karena tidak memenuhi syarat jabatan. Sedangkan dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 3.620.714.045,- atau 67,57%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada, terdapat efisiensi sebesar 46,57%. Efisiensi ini disebabkan karena terdapat Silpa dan sisa belanja yang terdiri dari :

- Kontribusi kegiatan PKA dan PKP lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT sebesar Rp. 408.443.783,- (Silpa ada di Kas Daerah);
- Kegiatan PKN Tingkat II ditargetkan 16 orang, namun yang bisa mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 15 orang, dikarenakan 1 orang belum memenuhi syarat jabatan. Disamping itu terdapat 1 orang yang tidak membayar biaya pelatihan, karena seluruh pembiayaan di tanggung oleh lembaga penyelenggaran diklat, oleh karena itu terdapat sisa belanja sebesar Rp. 60.474.698,-

- Kegiatan PKA dan PKP bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT tidak melakukan studi lapangan ke luar daerah NTT, berdasarkan usulan dari Kepala BPSDMD Provinsi NTT melalui Surat Nomor : 800.2/460/BPSDMD 01.2, tanggal 7 Mei 2024, Perihal : Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; yang disetujui oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melalui surat Nomor : 900.1.3.3/1138/BKUD3.1, tanggal 10 Juni 2024, Hal : Ketersediaan Dana, terdapat sisa belanja dari Kegiatan pelatihan dan Studi Lapangan sebesar Rp. 1.217.893.837,-
 - Kegiatan Survey dalam rangka pelaksanaan PKN Tk II di Provinsi NTT, terdapat sisa belanja sebesar Rp. 51.154.640,-
- b) Terselenggaranya pengembangan kompetensi pemerintahan dan sosial kultural. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan adalah Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku ASN dalam melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan. Sedangkan Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%, untuk mencapai target kinerja indikator ini telah ditetapkan 6 (enam) jenis pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan bimtek, yang mana 1 (satu) pelatihan penganggarannya ada yang bersumber dari APBD, sedangkan 5 (lima) pelatihan/bimtek lainnya adalah Non APBD (Non Budget). Dukungan alokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 151.025.000,- dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini secara kinerja mencapai 100%. Sedangkan dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 109.565.549,- atau 72,55%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada, terdapat efisiensi sebesar 37,83%. efisiensi ini disebabkan karena terdapat sisa belanja;
7. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerja Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Pengembangan

Kompetensi Teknis adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Sedangkan Pengembangan Kompetensi Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%, untuk mencapai target kinerja indikator ini ditetapkan 13 (tiga belas) jenis pengembangan kompetensi melalui pelatihan, bimtek, dan orientasi, yang mana 4 (empat) jenis pelatihan penganggarnya ada yang bersumber dari APBD, sedangkan 9 (sembilan) pelatihan lainnya bersumber dari DAK Dinas PK Provinsi NTT dan APBD Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya secara fasilitasi. Dukungan alokasikan dana melalui APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 1.022.889.000,- dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 99,83%. Sedangkan dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 664.880.064,- atau 65%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada, terdapat efisiensi sebesar 53,60%, efisiensi ini merupakan sisa belanja;

8. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerjanya adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pelayanan administrasi perkantoran adalah layanan yang dapat ditemukan di lingkup perkantoran atau pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi. Ditargetkan capaian dari indikator ini adalah 100%. Untuk mencapai target kinerja ini, mendapat dukungan alokasi dana dari APBD Provinsi NTT sebesar Rp. 11.705.590.416,- dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator ini, secara kinerja mencapai 100%. Sedangkan dari aspek penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 9.951.979.676,- atau 85,02%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang ada, terdapat efisiensi sebesar 17,60%, efisiensi tersebut merupakan sisa belanja.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel : 11

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Predikat Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat	B	B	100	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	136.695.000,-	129.594.898,-	94,81
		2. Akreditasi Program Pelatihan teknis dan Fungsional	Jml Prog	4	0	0	-	-	-	-
		3. Pelatihan sesuai standar	Persen	100	100	100	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	6.753.137.000,-	4.759.859.528,-	70,48

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
							Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum; dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.			
		4. Pelatihan sesuai kebutuhan (fasilitasi pengembangan kompetensi ASN melalui system pembelajaran terintegrasi/ASN corporate university)	JP	5.824	3.526	60,50	-	-	-	-
2	Meningkatnya prasarana dan sarana kepelatihan	1. Berfungsinya prasarana dan sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.466.103.000,-	1.155.265.931,-	78,80

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
							Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.			
		2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana pada BPSDMD NTT	Persen	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya,	448.137.120,-	320.217.000,-	71,46
3.	Terwujudnya pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran	1. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	-	-	-	-
		2. Tersedianya Perangkat Pembelajaran	Persen	100	100	100	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi,	15.000.000,-	2.838.660,-	18,92

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
		sesuai kebutuhan					Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional			
4	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Pemerintahan, dan Sosial Kultural ASN	1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi Manajerial	Persen	100	99,04	99,04	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	5.358.681.000,-	3.620.714.045,-	67,57
		2. Terselenggaranya pengembangan kompetensi pemerintahan dan	Persen	100	100	100	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,	151.025.000,-	109.565.546,-	72,55

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
		Sosial Kultural					Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.			
5.	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Fungsional ASN	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Persen	100	99,83	99,83	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.	1.022.889.000,-	664.880.064,-	65,00
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	11.705.590.416,-	9.951.979.676,-	85,02

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
	yang berkualitas						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
							Tamu, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sub Kegiatan Sumber Daya Air dan Listrik, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

G. Realisasi Anggaran yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

1. Realisasi Belanja

Pada Tahun 2025 dari alokasi anggaran APBD sebesar Rp. **20.624.014.536,-** (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. **16.187.322.135,-** (Enam Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau persentase sebesar 78,49% (Tujuh Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Persen) dengan persentase realisasi fisik sebesar 99,72 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Dua Persen). Adapun rincian realisasi dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 12
Realisasi Belanja serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Yang Bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2024

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						20.624.014.536	14.400.521.542	69,82	92,35	1.786.800.593	8,66	7,38	16.187.322.135	78,49	99,72
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						<u>13.619.830.536</u>	<u>9.937.169.650</u>	<u>72,96</u>	<u>93,92</u>	<u>1.490.292.957</u>	<u>10,94</u>	<u>5,61</u>	<u>11.427.462.607</u>	<u>83,90</u>	<u>99,53</u>
		1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86.616.000	67.713.415	78,18	89,58	15.340.805	17,71	10,42	83.054.220	95,89	100,00
				0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Kinerja Bulanan (2024), Triwulan (2024), Semester (2024), Tahunan ; - Tersedianya Dokumen LKIP (2023) - Tersedianya Dokumen LKPJ (2023) - Tersedianya Laporan Bulanan Budaya Kerja 2024 - Tersedianya Laporan Reformasi Birokrasi 2024 - Tersedianya Paket Jasa Sertifikasi Surveilnce ISO 9001 : 2015	86.616.000	67.713.415	78,18	89,58	15.340.805	17,71	10,42	83.054.220	95,89	100,00

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
		1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	9.374.177.000	6.988.157.701	74,55	91,67	925.097.665	9,87	8,33	7.913.255.366	84,42	100,00
							9.374.177.000	6.988.157.701	74,55	91,67	925.097.665	9,87	8,33	7.913.255.366	84,42	100,00
		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.842.500	172.344.689	89,84	92,81	18.045.125	9,41	7,19	190.389.814	99,24	100,00
				0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32.940.000	31.351.500	95,18	91,67	1.252.000	3,80	8,33	32.603.500	98,98	100,00
				0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	30.668.000	26.400.000	86,08	91,67	4.268.000	13,92	8,33	30.668.000	100,00	100,00
				0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan	10.000.000	8.800.000	88,00	91,84	800.000	8,00	8,16	9.600.000	96,00	100,00
				0007	Penyediaan Bahan / Material	- Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	88.234.500	76.005.589	86,14	100,00	11.525.125	13,06	-	87.530.714	99,20	100,00
				0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya makan minum rapat dan makan minum jamuan tamu	30.000.000	29.787.600	99,29	95,83	200.000	0,67	4,17	29.987.600	99,96	100,00
		1.07	Pengadaan Barang Milik				448.137.120	286.679.400	63,97	91,38	33.537.600	7,48	-	320.217.000	71,46	91,38

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedianya Printer - Kipas Angin Dinding (sdh realisasi bulan nopember) - Pompa air (sudah realisasi) - CCTV - Kamera - Tersedianya Komputer (PC All in One)	341.668.620	194.798.000	57,01	100,00	28.130.000	8,23	-	222.928.000	65,25	100,00
				0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- Tersedianya Box Arsip - Tersedianya Menara Tandon - Tersedianya Profil Tank (Tandon) - Tersedianya Tempat sampah - Kursi Kaban - Tersedianya Lemari Arsip	106.468.500	91.881.400	86,30	89,58	5.407.600	5,08	-	97.289.000	91,38	89,58
		1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				2.052.954.916	1.531.948.910	74,62	91,67	233.331.366	11,37	8,33	1.765.280.276	85,99	100,00
				0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
			Pemerintah Daerah			- Tersedianya materai	12.000.000	11.000.000	91,67	91,67	1.000.000	8,33	8,33	12.000.000	100,00	100,00
				0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Jasa Lisrik dan Air	450.000.000	258.629.510	57,47	91,67	37.241.966	8,28	8,33	295.871.476	65,75	100,00
				0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Tersedianya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD - Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit - Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak - Tersedianya Jasa Laundry - Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras - Tersedianya Lembur	1.590.954.916	1.262.319.400	79,34	91,67	195.089.400	12,26	8,33	1.457.408.800	91,61	100,00
						- Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN										

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
		1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.466.103.000	890.325.535	60,73	99,83	264.940.396	18,07	0,17	1.155.265.931	78,80	100,00
				0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (7 Unit)	220.500.000	149.271.215	67,70	91,67	26.327.450	11,94	8,33	175.598.665	79,64	100,00
				0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terpeliharanya Mesin Potong Rumput; - Terpeliharanya Printer (20 unit); - Terpeliharanya AC (150 unit); - Terpeliharanya computer / Note Book (50 Unit)	162.067.000	123.765.000	76,37	100,00	15.700.000	9,69	-	139.465.000	86,05	100,00
				0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terpeliharanya bangunan gedung kantor (Sekretariat, Ruang kerja Bidang Teknis, Selasar, Ruang Kelas, Ruang Makan, Ruang WI, Gudang Beras, Aula, Toilet Kantor, Toilet Ruang Kelas, Toilet Aula);	1.083.536.000	617.289.320	56,97	100,00	222.912.946	20,57	-	840.202.266	77,54	100,00

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
						- Terpeliharanya Asrama Mutis; - Terpeliharanya Asrama Teratai;										
						Terpeliharanya Asrama Nusa Lontar I; - Terpeliharanya Asrama Nusa Lontar II; - Terpeliharanya Asrama Toilet Nusa Lontar I; - Terpeliharanya Asrama Toilet Nusa Lontar II; - Pemeliharaan Taman;										
02	Pengembangan Sumber Daya Manusia						<u>7.004.184.000</u>	<u>4.463.351.892</u>	<u>63,72</u>	<u>90,53</u>	<u>296.507.636</u>	<u>4,23</u>	<u>9,42</u>	<u>4.759.859.528</u>	<u>67,96</u>	<u>99,95</u>
		1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				720.839.000	390.366.291	54,15	88,27	116.496.036	16,16	11,73	506.862.327	70,32	100,00
				0003	Penyelenggara n Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	- Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis SDM Aparatur - Terselenggaranya Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika	720.839.000	390.366.291	54,15	88,27	116.496.036	16,16	11,73	506.862.327	70,32	100,00

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
					Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.	- dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT										
		1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				6.283.345.000	4.072.985.601	64,82	99,46	180.011.600	2,86	0,27	4.252.997.201	67,69	99,73
				0001	Penyusunan, Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kempemimpina n dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional.	- Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	251.047.000	177.902.315	70,86	100,00	-	-	-	177.902.315	70,86	100,00
				0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan	- Sertifikasi kompetensi - Okupasi PPK	302.050.000	158.017.737	52,32	100,00	-	-	-	158.017.737	52,32	100,00

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
					Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1										
				0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	- Terselenggaranya Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS Evaluasi - Penjaminan Mutu Pelatihan - Terselenggaranya Sewa Aset Tak Berwujud / Sewa Hosting Website) - Terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	205.542.000	159.358.898	77,53	96,15	24.600.000	11,97	3,85	183.958.898	89,50	100,00
				0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional	- Terselenggaranya Pengembangan Transformasi Digital LMS (Lisensi Zoom Meeting)	15.000.000	2.606.670	17,38	100,00	231.990	1,55	-	2.838.660	18,92	100,00
				0007	Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	- Terselenggaranya Diklat Reformasi Birokrasi Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	5.509.706.000	3.575.099.981	64,89	99,61	155.179.610	2,82	-	3.730.279.591	67,70	99,6

REK	PROGRAM	REK	KEGIATAN	REK	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S/D BULAN INI		
								KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %	KEUANGAN	KEU %	FSK %
					Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Instansi Vertikal se-NTT Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Instansi Vertikal se-NTT Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN) Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Instansi Vertikal se-NTT										
JUMLAH							20.624.014.536	14.400.521.542	69,82	92,35	1.786.800.593	8,66	7,38	16.187.322.135	78,49	99,72

2. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun 2024 BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan untuk capaian Pendapat Asli Daerah melalui berbagai Program Pelatihan maupun penggunaan Aset Daerah sebesar Rp. 17.682.363.555,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.075.712.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupian) atau 17,39% (Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Sembilan Persen). Adapun Rincain Realisasinya sebagaimana tergambar pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 13
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada BPSDMD Provinsi NTT
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian (Jenis Retribusi / Obyek Retribusi)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	Pendapatan Daerah	17.682.363.555	3.075.712.000	17,39
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.682.363.555	3.075.712.000	17,39
4.1.02	Retribusi Daerah	17.682.363.555	3.075.712.000	17,39
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	16.613.474.454	2.629.760.000	15,83
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	16.613.474.454	2.629.760.000	15,83
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	16.613.474.454	2.629.760.000	15,83
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.068.889.101	445.952.000	41,72
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	1.357.125.000	1.319.367.500	
TOTAL		17.682.363.555	3.075.712.000	17,39

Bab IV

Penutup

4.1 . Kesimpulan

Simpulan atas capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat ditinjau dengan membandingkan antara beberapa aspek diantaranya :

1. Capaian kinerja organisasi berdasarkan target dan realisasi kinerja Tahun 2024, yang mana Realisasi Kinerja BPSDMD Provinsi NTT berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024 terhadap 6 (enam) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama adalah rata – rata mencapai 88,31% sehingga dapat disimpulkan bahwa Kategori Capaian Kinerja untuk Tahun 2024 adalah **SANGAT BAIK**; Adapun penyebab keberhasilan kinerja BPSDMD Provinsi NTT adalah karena adanya Dukungan dari Gubernur melalui pendanaan, regulasi, serta intensitas koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yaitu Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan lembaga diklat lainnya.
2. Akuntabilitas keuangan menggambarkan kinerja penyerapan anggaran belanja yaitu dari pagu sebesar Rp. 20.624.014.536,- terserap sebesar Rp. 16.187.322.135 atau 78,49%, tidak tercapainya target kinerja keuangan ini dikarenakan adanya efisiensi kegiatan serta sisa belanja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, huruf E tentang Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Sedangkan kinerja pencapaian Pendapatan dari target sebesar Rp. 17.682.363.555,- terealisasi sebesar Rp. 3.075.712.000,- atau 17,39%. Pendapatan ini bersumber dari retribusi pelayanan pendidikan yang berasal dari biaya kontribusi pelatihan dari peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota, serta retribusi penggunaan aset di BPSDMD Provinsi NTT.

4.2 . Rencana Tindak Lanjut

1. Pengukuran capaian kinerja ini diharapkan bisa menjadi tolok ukur atau acuan dalam peningkatan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan menjadi dasar untuk mengevaluasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

2. Persoalan krusial yang perlu ditindak lanjuti adalah menyusun produk hukum daerah dalam bentuk Keputusan Gubernur tentang implementasi corporate university di provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur NTT Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
3. Dalam rangka menunjang peningkatan predikat akreditasi BPSDMD Provinsi NTT sebagai lembaga penyelenggaran pengembangan kompetensi di Provinsi NTT, maka prasarana dan sarana kepelatihan sesuai ketentuan Akreditasi Lembaga Pembina (LAN-RI), adalah hal yang perlu menjadi focus perhatian untuk ditingkatkan dalam perencanaan dan pelaksanaanya dari tahun ke tahun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini di susun dan disampaikan, sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024.

Kiranya Tuhan menyertai segala usaha dan pengabdian kita, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Flobamora tercinta.

Kupang, 03 Februari 2025

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

HENDERINA SINTICHE LAISKODAT, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008